

Resor Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya tidak berwenang untuk menangani perkara yang terjadi diluar wilayah hukumnya sebagaimana tertuang dalam Perkap Kapolri Nomor 12 tahun 2017 tentang syarat dan tatacara penetapan pembagian daerah hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini mempengaruhi prosedur hukum yang harus diikuti oleh pihak terkait, termasuk Advokat DPC POSBAKUMADIN SURABAYA yang mewakili terdakwa. Perbedaan wilayah hukum ini memastikan bahwa Advokat DPC POSBAKUMADIN SURABAYA memahami dengan jelas yurisdiksi yang berlaku dan melaksanakan kewajiban hukum sesuai dengan ketentuan yang ada.

Setelah terdakwa meminta bantuan hukum kepada DPC POSBAKUMADIN SURABAYA di bawah naungan Bapak Belly V.S Daniel Karamoy S.H., M.H., berbagai proses persidangan. Dalam proses ini, beberapa fakta yang memberikan gambaran lebih jelas mengenai persidangan. Salah satu fakta penting adalah Surat Dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum terkait kasus judi online ini kurang teliti dan kurang cermat pada saat menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan. Namun dalam persidangan ini memberi kesempatan yaitu untuk mengajukan nota keberatan (Eksepsi). Dan sebagai bahan pertimbangan yang dikutip oleh Bapak Belly V.S Daniel Karamoy S.H., M.H ada beberapa Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI mengenai surat dakwaan, sebagai berikut :